BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Menurut Haniffa (2002) pengungkapan merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu sehingga membuat suatu tindakan tersebut untuk diketahui. Pengungkapan pada istilah akuntansi mengacu kepada pengungkapan dan penyajian informasi yang terdapat laporan keuangan suatu perusahaan. Terdapat dua jenis pengungkapan pada perusahaan yaitu pengungkapan wajid dan pengungkapan sukarela. Pemerintah di Indonesia menjabarkan ketentuan terkait pengungkapan CSR dalam UU Tahun 2007 Nomor 40 mengenai PT (Perseroan Terbatas) berisi tentang penegasan bahwa dalam perusahaan harus memuat informasi mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial serta informasi mengenai pertanggung jawaban terhadap lingkungan hidup dalam *annual report* perusahaan. Penyajian pada pengungkapan informasi mengenai tanggung jawab sosial dalam perspektif secara islam dengan perspektif konvensional dalam seharusnya berbeda Haniffa (2002). Menurut Rifqi (2009) kerangka syariah perlu digunakan untuk menyususn konsep ISR dengan tujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi yang harus dipenuhi, baik kepada sang pencipta (Tuhan), kepada sesama manusia dan tanggung jawab kepada alam semesta.

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengungkapan CSR sudah banyak diteliti, seperti penelitian Majeed, et.al. (2015) di Pakistan, penelitian Farook, et.al. (2011) meneliti tentang CSR pada perbankan syariah dan Rouf (2011) meneliti tentang CSR di Bangladesh, untuk penelitian mengenai

pengungkapan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Badjuri (2011), Chariri (2012), Herusetya (2012) dan Sembiring (2013) yaitu dengan menghubungkan faktor- faktor dari karakteristik perusahaan, GCG dan juga kinerja keuangan. Penelitian mengenai pengungkapan sosial pada institusi islam juga banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan menggunakan index ISR sebagai pengukuran pada indikator ISR seperti pada penelitian Haniffa (2002), Kurniawati (2017), Taufik, et.al. (2015) dan Asrori (2016). Penelitian-penelitian terdahulu menggunakan pengukuran berbeda-beda pada pemilihan variabel sehingga memperoleh hasil yang berbeda, maka pada penelitian ini menggunakan alat analisis tunggal dalam pemilihan variabel yaitu menggunakan alat analisis faktor melalui pendekatan eksploratori, tujuannya penelitian ini menggunakan analisis faktor yaitu untuk mereduksi data atau memperkecil jumlah variabel asal atau variabel awal menjadi variabel baru yang mana hasil dari analisis faktor akan di uji dan dianalisis lebih lanjut. Penelitian terdahulu yang dikembangkan peneliti yaitu penelitian Othman, et.al. (2009) yang secara khusus juga mengembangkan penelitian mengenai ISR dari peneliti sebelumnya yaitu Haniffa, (2002). Penelitian mengenai mengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Islamic Social Reporting* menurut penelitian terdahulu dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya umur dari perusahaan.

Umur perusahaan menggambarkan mengenai berapa lama suatu perusahaan berdiri dan menjalankan usahanya. Lestari (2013) mengemukakan terdapat hubungan yang positif umur perusahaan dengan pelaporan sukarela perusahaan tersebut. Hal tersebut disebabkan semakin lama perusahaan berdiri maka maka akan bertambah pengalaman perusahaan dalam melakukan pelaporan keuangan yang baik dan lebih banyak memahami mengenai kebutuhan mengenai

informasi khalayak mengenai perusahaan, sehingga mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan sosialnya. Widiyanti (2017) mengemukakan pengungkapan sosial memiliki peran penting padasuatu perusahaan dan dianggap sebagai media komunikasi antara perusahaan dengan para*stakeholders*, suatu perusahaan akan mudah beradaptasi dengan para stakeholdernya dengan seiringnya usia perusahaan. Perusahaan akan menerbitkan laporan pertanggungjawaban sosialnya secara berkelanjutan setiap akhir periode atau setiap tahun dalam rangka memberikan *feedback* kepada para *stakeholder*snya. Semakin lama Perusahaan beroperasi maka harapannya perusahaan mengetahui harapan dari para *stakeholders*nya selanjutnya akan terus berupaya untuk pemenuhan dari kebutuhan *stakeholders* dengan cara meningkatkan kualitas pengungkapan sosial. Penelitian terdahulu yang mendukung variabel umur perusahaan adalah Sembiring (2013) dan Widiyanti (2017). Sedangkan penelitian yang tidak mendukung variabel ini adalah Lestari (2013).

Ukuran perusahaan pada peneliti terdahulu diproksi dengan melihat total aset perusahaan pada akhir tahun, jika ukuran perusahaan semakin besar maka akan besar pula penggunaan sumber daya yang digunakan maka perusahaan harus lebih banyak dalam melakukan pengungkapan sukarela termasuk pengungkapan ISR. Penelitian yang mendukung penelitian ini adalah (Othman, et.al, 2009; Ayu, 2013; Putra, et.al, 2014; Herwijayanti, 2015 dan Asrori, 2016), sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu tetapi hasilnya tidak signifikan dilakukan oleh Rouf (2011).

Pengukuran variabel ukuran dewan Komisaris oleh peneliti terdahulu dengan total jumlah dari seluruh anggota dewan komisaris pada perusahaan. Dewan komisaris merupakan elemen penting pada mekanisme *Good corporate*

governance. Adapun Peran dari dewan komisaris adalah untuk mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh para direksi agar berjalan dapat berjalan baik seperti yang diharapkan. Harapannya dewan komisaris pada perusahaan dapat menjadi pendorong tercipta suatu sistem pengendalian internal pada manajemen suatu perusahaan. *Corporate governance* memiliki tingkat independensi dewan komisaris berkaitan dengan komposisi dan independensi dapat menjadikan dewan komisaris semakin menunjukkan efektifitasnya, hal tersebut tertuang pada study empiris (Nurkhin, 2009; Khan, 2010; Huafang dan Jianguo, 2007; dalam Chariri, 2012) yang mengemukakan jika ukuran dewan komisaris semakin besar maka akan berdampak pada pengungkapan tanggung jawab sosial suatu perusahaan semakin luas, apabila ukuran dewan komisaris semakin besar maka dewan komisaris semakin mudah dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen serta lebih mudah dalam mengendalikan manajemen puncak. Dewan komisaris dan pengungkapan sosial jika dikaitkan akan memberikan dampak tekanan kepada manajemen, sehingga manajeman akan semakin giat untuk mengungkapkan *Islamic Social Reporting*. Penelitian yang mendukung variabel ukuran dewan komisaris adalah Asrori (2016), Kurniawati (2017) dan Badajuri (2011), sedangkan penelitian yang tidak mendukung yaitu Asrori (2016).

Komite Audit memiliki peran dan tanggung jawab pada pelaporan keuangan, peran komite audit yaitu untuk memantau serta mengawasi proses dari audit laporan keuangan dan memastikan perusahaan mengikuti standar serta kebijakan keuangan yang berlaku terpenuhi, dan selanjutnya tugas dari komite audit yaitu melakukan pemeriksaan ulang terdahap laporan keuangan tentang kekonsistenan informasi serta melakukan penilai terhadap kewajaran dari biaya

yang diajukan auditor eksternal dan mutu pelayanan (KNKCG, 2002). Jika ukuran komute audit pada perusahaan semakin besar akan berdampak pada semakin luas pengungkapan tanggung jawab sosial Sembiring (2003), pertanggung jawaban perusahaan semakin luas termasuk ISR karena peran dari komite audit juga besar sehingga mampu untuk memantau serta mengendalikan manajemen puncak secara efektif. Peneliti terdahulu memperoleh hasil negatif mengenai pengaruh komite audit dengan ISR yaitu penelitian Kurniawati (2017), Asrori (2016), Badjuri (2011), Chariri (2012) dan Rouf (2011).

Proporsi komisaris independen merupakan salah satu mekanisme tata kelola perusahaan. komisaris independen dan tidak mempunyai hubungan dengan keuangan, tidak memiliki hubungan dengan tata kelola perusahaan, dan tidak terdapat hubungan denagn keluarga pemegang saham, kepemilikan saham, dan maupun anggota komisaris, atau direktur, juga tidak terdapat korelasi dengan keuangan sera pemegang saham dari bank syariah Lestari (2013). Oleh karena itu, tindakan independen dapat dilakukan oleh komisaris independen serta memiliki cukup ruang bagi komisaris independen untuk bertindak obyektif tanpa konflik kepentingan. Pengungkapantata kelola perusahaan yang baik (GCG) adalah wajib mempertimbangkan usia perusahaan dan proporsi komisaris independen. Hasil penelitian Lestari (2013) menemukan jika tidak terdapat pengaruh proporsi komisaris independen terhadap ISR.

Jumlah rapat komite audit ialah total seluruh pertemuan oleh komite audit dan rapat yang dilakukan di internal perusahaan pada periode tertentu. Skala pengukuran variabel yaitu dengan menggunakan indikator total rapat komite audit pada 1 tahun serta yang tercantum pada annual report atau laporan tata kelola perusahaan Waryanto (2010) dalam Chariri (2012). Semakin intens komite audit

dalam mengadakan rapat dan pertemuan maka semakin baik devisi komite audit dalam melakukan koordinasi serta menjalankan tugasnya lebih efektif. Peneliti yang mendukung yaitu Chariri (2012), ia mengatakan jika jumlah pertemuan komite audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting perbankan syariah di Asia, yang artinya apabila rapat pada komite audit sering dilakukan akan berdampak positif terhadap pengungkapan informasi yang transparan, yang didalamnya termasuk pengungkapan *Corporate Social Responsibily*.

Kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah dari saham pihak manajemen perusahaan, peneliti terdahulu mengukur kepemilikan manajerial diproxy dengan jumlah saham manajerial terhadap total saham perusahaan, apabila proporsi kepemilikan manajerial semakin besar pada perusahaan, berdampak positif pada penciptaan nilai terbaik karena manajemen sebagai pemilik perusahaan tersebut sehingga akan terus memberikan kinerja terbaik dalam pengelolaan perusahaan. Penelitian Badjuri (2011) tidak sejalan dengan dugaan tersebut, ia mengemukakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibily*.

Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki suatu institusi tertentu dalam perusahaan, institusi yang dimaksud seperti bank, *asset management*, dana pensiun dan perusahaan asuransi, (Koh, 2003; Veronica dan Bachtiar, 2005 dalam Badjuri, 2011). Peneliti terdahulu Fachrurrozi (2013) mengukur kepemilikan institusional dengan cara total presentase saham milik institusi terhadap total saham perusahaan beredar. Suatu perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional besar maka akan mampu mengawasi dan memantau kinerja dari manajemen, Herwijayanti, et.al. (2015) saham yang

dimiliki oleh lembaga dapat membuat kontrol yang efektif kepada manajemen perusahaan. Investor dari institusi yang menanamkan modal pada perusahaan tentu memiliki pengalaman serta kekuatan dalam penerapan GCG sehingga investor dari institusi akan menuntut pihak perusahaan dalam hal komunikasi secara transparan. Jika dikaitkan pengungkapan *Islamic Social Reporting*, aktivitas dari pengawasan serta pemantauan investor institusi dapat menekan pihak manajemen perusahaan dalam melakukan mengungkapkan informasi tanggung jawab sosialnya. Penelitian mengenai variabel kepemilikan institusional didukung oleh Majeed (2015), tetapi hasil penelitian oleh Fachurrozie (2013), Badjuri (2011) dan Herwijayanti, et.al. (2015).

Penelitian Asrori (2016), Sembiring (2013) dan Badjuri (2011), mengatakan kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Kepemilikan saham publik adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki masyarakat atau publik yang kepemilikannya masing-masing kurang dari 5%, cara pengukuranya dengan menggunakan rasio jumlah saham publik terhadap total saham perusahaan. Rasio kepemilikan publik yang tinggi diprediksi melakukan pengungkapan sosial lebih luas, hal tersebut karena perusahaan memiliki beban moral yang tinggi terhadap masyarakat luas atau publik Badjuri (2011).

Bank syariah memiliki struktur yang berbeda dari tata kelola perusahaan yang digunakan oleh perbankan konvensional, perbedaan tersebut karena Bank Islam memiliki DPS (Dewan Pengawas Syariah). Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas untuk memberikan nasihat serta saran kepada para direksi dan melakukan pengawasan pada setiap kegiatan bank syariah agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang ada menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009. Keberadaan dewan pengawas syariah sendiri pada perbankan

syariah yaitu sebagai upaya dalam meningkatkan *Good Corporate Governace* institusi syariah. Baiknya jika DPS pada institusi terdiri dari ahli ulama yang memahami ekonomi islam serta hukum-hukum islam, namum pada praktiknya dewan pengawas syariah juga terdiri dari orang-orang yang ahli dalam ekonomi islam (Taufik 2015). Fungsi utama dewan pengawas syariah yaitu mengarahkan, meninjau dan mengawasi kegiatan bank syariah serta harus memastikan jika bank syariah telah berjalan dengan prinsip-prinsip islam, maka idealnya jika DPS memiliki anggota yang banyak tentu dapat meningkatkan pengungkapan ISR perusahaan. Peneliti ini didukung variabel ini dilakukan oleh (Farook, et.al. 2011; Taufik, 201; Fachrurrozie, 2013; Chairiri, 2012; dan Rahman, 2013).

Komposisi direksi wanita merupakan persentase direktur wanita pada suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan untuk menguji hubungan antara komposisi direksi wanita terhadap pengungkapan CSR dilakukan Majeed (2015) di Pakistan menggunakan pengukuran persentase direktur wanita terhadap total direksi perusahaan.menemukan bahwa komposisi direksi wanita namun hasilnya tidak signifikan hal tersebut karenapartisipasi perempuan dalam hal pemerintahan tidak seperti negara-negara lain. Alasannya adalah bahwa tren partisipasi perempuan di Pakistan rendah, sebagian besar mereka bertindak sebagai mitra tidur di dalam bisnis.

Jumlah Rapat Dewan Komisaris merupakan total dari pertemuan rapat yang dilakukan dewan komisaris pada perusahaan secara internal dalam kurun waktu tertentu. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala nominal total rapat yang dilakukan Dewan Komisaris, skala nominal dapat dilihat pada laporan tahunan perusahaan *(annual report).* Untuk mnegevaluasi kebijakan para direksi serta pengimplemantasian dari kebijakan tersebut maka dewan komisaris harus

melakukan rapat rutin. Frekuensi rapat dewan komisaris dapat mempengaruhi nilai kinerja pasar suatu perusahaan Murniati (2010) dalam Chariri (2011). Kinerja perusahaan akan semakin baik jika dewan komisaris sering melakukan rapat serta pertemuan internal, namun pada hasil penelitian Chariri (2012) menemukan frekuensi rapat komisaris hanya dapat mempengaruhi *Corporate Social Responsibily* sebesar 55%, sehingga dapat disimpulkan jika faktor-faktor dari karakteristik *Good Corporate Governace* masih belum dapat meningkatkan mekanisme pengawasan dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibily*.

Profitabilitas merupakan kemampuan dari suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi profitabilitas pada perusahaan harapannya perusahaan mampu mneghasilkan laba semakin baik. Hal tersebut dapat di interpretasikan bahwa profitabilitas yang tinggi dapat mengatasi biaya yang timbul dari CSR, profitabilitas tinggi dapat memberikan gambaran perusahaan tentang kemampuannya dalam memperoleh laba yang tinggi, yang akan berdampak pada peningkatan pengungkapan CSR lebih luas (Herusetya, 2012). Jika dilihat berdasarkan perspektif dari sudut Islam suatu perusahaan harus secara sukarela dalam memberikan *full desclosure* tanpa melihat apakah keputusan tersebut dapat menghasilkan keuntungan atau tidak (Haniffa, 2002). Beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung variabel ini menemukan ada pengaruh profitabilitas terhadap CSR dan ISR yaitu penelitian (Othman, et.al, 2009; Kurniawati, 2017; Sembiring, 2013 dan Rouf 2011). Adapaun peneliti yang menemukan bahwa profitabilitas memiliki terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting dan Corporate Social Reporting Majeed (2015) di Pakistan, ia mengemukakan sifat perusahaan Pakistan tentang lebih baik menginvestasikan kembali dana kedalam kegiatan bisnis dari pada kegiatan sosial dan juga ada alasan lain, seperti krisis

politik dan pemerintahan yang tidak stabil yang telah mengakibatkan menyeret investasi di luar Pakistan, sejalan dengan hasil penelitian (Fachrurrozie, 2013; Nugrahenil, 2017; Ayu, 2013; dan Majeed, 2015) juga menemukan hasil negatif dari pengaruh profitabilitas terhadap ISR atau CSR.

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan yang jatuh tempo. Pengeloalan likuiditas perusahaan yang baik dan tinggi dapat memberikan sinyal jika mereka lebih baik dari perusahaan lain. Sinyal tersebut dapat dijadikan cerminan perusahaan dalam rangka memberikan informasi yang lebih luas mengenai CSR yang yang dilakukan perusahaan. Sehingga diduga bahwa likuiditas suatu entitas memiliki hubungan yang positif terhadap pengelolaan *Corporate Social Responsibily*. Beberapa peneliti terdahulu menemukan mengenai tidak adanya pengaruh likuiditas terhadap *Corporate Social Responsibily* seperti pada penelitian Mahendra, et.al. (2012), Badjuri (2011), Mahendra et.al. (2012) dan Herusetya (2012), sedangkan penelitian yang setuju mendukung variabel ini adalah Widiyanti (2017).

Variabel *leverage* pada penelitian ini dinyatakan dalam DTA (*Debt to Asset*) seperti penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2013), menunjukkan jika tidak terdapat pengaruh antara *leverage* dengan CSR perusahaan, pada kerangka *theory agency* sebagai agen manajemen akan terus berupaya untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial serendah mungkin dengan tujuan agar dapat menghindari tekanan para *debtholders*, karena kemungkinannya apabila tidak ditekan oleh *debtholders* maka perusahaan dapat menjadikan aktivitas sosial sebagai kepentingan yang didahulukan dari pada kepentingan *debtholders* sendiri. Adapun yang mendukung yaitu penelitian (Sembiring, 2013; Badjuri, 2011 dan Mahendra,*et.al*, 2012), tetapi penelitian Taufik, et.al. (2015) dan Herwijayanti,

et.al. 2015) menemukan terdapat hubungan variabel leverage terhadap CSR atau ISR.

Solvabilitas merupakan kekayaan perusahaan yang cukup dalam menutup kewajiban perusahaan, untuk jangka panjang dan pendek jika suatu perusahaaan dilikuidasi. Hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh solvabilitas oleh Putra, et.al. (2014) dan Herusetya (2012), memperoleh hasil jika solvabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap ISR dan CSR. Hasil negatif tersebut akibat dari implikasi regulasi pada *Corporate Social Responsibility* yang diatur dalam Undang-Undang tahun 2007 Nomor 25 (UUPM) pasal 15 huruf b serta Undang-Undang tahun 2007 Nomor 40 pasal 74 yang akhirnya menciptakan penerapan pengungkapan sosial dalam hal ini *Corporate Social Responsibility* seluruh perusahaan publik buan lagi secara sukarela tetapi secara wajib.

Ringkasan penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting* maupun *Corporate Social Responsibility* sebagai berikut:

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Pengarang, Judul, Sumber, dan Tahun	Variabel Penelitian	Kesimpulan
1	**Othman, et.al. (2009)**	Variabel Dependen: • ISR Variabel Independen : • Size • Profitability • Board composition • Industry type	• ISR signifikan memiliki hubungan dengan ukuran perusahaan (H1), profitabilitas (H2), komposisi dewan (H3). • Jenis industri (H4) ditemukan tidak signifikan
2	**Taufik, et.al. (2015)**	Variabel Dependen: • Tingkat pengungkapan ISR Variabel Independen : • Islamic Governance Score • Leverage • Profitabilitas	• IG-Score, Leverage dan Profitabilitas secara simultan memiliki pengaruh terhadap ISR • IG-Score tidak mempunyai pengaruh terhadap ISR • Debt to Equity Ratio (DER) positif berpengaruh tidak signifikan terhadap ISR. • Return on Assets positif berpengaruh terhadap ISR.
3	**Putra, et. al. (2014**	Variabel Dependen: • ISR Variabel Independen : • Likuiditas • Profitabilitas • Solvabilitas • Size • Good Corporate Governance	• Size secara signifikan dipengaruhi tingkat pengungkapan ISR, • Profitabilitas memiliki tingkat tidak signifikan terkena dampak dari pengungkapan ISR, • Solvabilitas memiliki tingkat tidak signifikan terkena dampak dari pengungkapan ISR, • Likuiditas memiliki tingkat tidak signifikan terkena dampak dari pengungkapan ISR • Good governance corporateg telah ada secara signifikan mempengaruhi pengungkapan ISR.
4	**Farook (2011)**	Variabel Dependen:	• Pengaruh Publik,

		• Tingkat Pengungkapan CSR Variabel Independen : • Pengaruh Publik yang relevan • Dewan Pengawas Syariah • Tingkat kebebasan sosial dan politik • Proporsi dana IAH	DPS sangat berpengaruh terhadap pengungkapan CSR • Tingkat kebebasan sosial dan politik memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sorporate social responsibility pada bank syariah, tetapi tidak sebesar variabel Pengaruh Publik dan DPS
5	**Majeed (2015)**	Variabel Dependen: • CSR Variabel Independen : • Direksi wanita • Ukuran dewan direksi • Direktur independen • Kepemilikan Warga negara asing • Konsentrasi kepemilikan • Kepemilikan institusional Variabel Kontrol: • Ukuran perusahaan • Profitabilitas	• Kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, Ukuran dewan direksi, konsentrasi kepemilikan berpengaruh dengan CSR. • Menampilkan hubungan bertentangan antara representasi direktur asing, direktur independen, profitabilitasdan Direksi wanita pada CSR
6	**Sembiring** (2013)	Variabel Dependen: • CSR Variabel Independen : • Profitabilitas • Umur • Deviden (Erning Per Share) • Company Size • Kepemilikan sahamPublik • Leverage	• Company size, Profitabilitas, umur *(age)* berpengaruh positif signifikan mempengaruhi CSR pada 5% level signifikansi • EPS, Kepemilikan Publik , dan leverage berpengaruh negatif CSR signifikan mempengaruhi CSR pada level signifikansi 10%
7	**Badjuri (2011)**	Variabel Dependen: • Pengungkapan CSR Variabel Independen : • Size • Komite Audit • KepemilikanIstutusiona	• Variabel leverage, , dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional kepemilikan manajerial, likuiditas, kepemilikan publik tidak memiliki pengaruh terhadap

		l • Komisaris Independen • Kepemilikan Saham Publik • Dewan Komisaris • Kepemilikan Manajerial • Likuiditas • Leverage • Profitabilitas	Corporate Social Responsibility. • Ukuran perusahaan, profitabilitas dan dewan komisaris independen, rasio memiliki pengaruh terhadap Corporate Social Responsibility. .
8	**Chariri (2012)**	Variabel Dependen: • Pengungkapan CSR Variabel Independen : • Profitabilitas • Jumlah Rapat Komite audit • Ukuran Komite Audit • Komposisi Dewan Komisaris Independen • Komposisi Keahlian DPS • Keberadaan DPS • Ukuran Dewan Komisaris • Frekuensi Rapat Dewan Komisaris • Komposisi Komite Audit	• Tidak terdapat pengaruh antara variabel profitabilitas ,ukuran komite audit, rapat dewan komisaris, Komposisi dewan komisaris, dan komposisi komite audit independen terhadap CSR • Terdapat pengaruh antara variabel ukuran dewan komisaris, IG-Score, dan rapat komite audit terhadap pengungkapan CSR.
9	**Asrori (2016)**	Variabel Dependen: • ISR Variabel Independen : • Kepemilikan Saham Publik Dewan Komisaris • Komite Audit • Ukuran Perusahaan (Size) • Type Produk	• Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap ISR. • Komite audit tidak ada pengaruh terhadap ISR. • Size memiliki pengaruh terhadap ISR. • Jenis produk memiliki pengaruh terhadap ISR. • Tidak ada pengaruh variabel Kepemilikan saham publik terhadap ISR.
10	**Rouf (2011)**	Variabel Dependen: • Tingkat Pengungkapan CSR Variabel Independen :	• Hubunganpositif antara proporsi Direktur Independen (INDS) terhadap *CSRD*. • Company Size tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat

		• Dewan Pengawas Syariah (Score) • Proporsi Direktur Independen (INDS) • Ukuran Perusahaan Variabel Kontrol: • Struktur Kepemimpinan Dewan (BLS) • Komite Audit Board (BAC) • Persentase Return on Equity (PROE**)**	pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. • Struktur Kepemimpinan Dewan (BLS), Komite Audit Board (BAC) dan Persentase Return on Equity (PROE) berhubungan positif terhadap *CSRD.*

Berdasarkan kelemahan peneliti sebelumnya dan juga kekosnistean variabel yang diteliti, maka penelitian mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi ISR perlu dikembangkan lagi. Penelitian ini menggunakan perbankan syariah sebagia objek penelitian dalam perannya sebagai institusi syariah juga bertanggung jawab terhadap pengungkapan ISR. Penelitian ini memadukan peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting dari penelitian Othman, et.al. (2009). Variabel dependen penelitian ini 1) Karakteristik Perusahaan, 2) *Good Corporate Governance*, 3) Kinerja Keuangan. Perbedaan dengan peneliti sebelumnya yaitu pada pengukuran variabel, peneliti terdahulu menggunakan pengukuran berbeda sehingga menghasilkan kesimpulan berbeda juga, sehingga penulis menggunkan alat analisis tunggal yaitu analsis faktor dalam memilih faktor-faktor yang membentuk setiap variabel yang memiliki pengaruh terhadap ISR.

2.2 Teori Legitimasi

Teori Legitimasi adalah teori yang dapat melandasi CSR dan memilihi hubungan yang erat dengan teori *stakeholder*, Dowling (1975) mengemukakan bahwa legitimasi bisa saja berubah dan bergeser seiring dengan perubahan masyarakat dan lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Legitimasi memiliki hubungan dengan nilai serta norma perusahaan dalam berinterasi dengan masyarakat beserta lingkungan sekitar perusahaan, hal ini yang menjadikan legitimasi menjadi hal yang penting dan diperhatikan, karena perusahaan merupakan bagian dari lingkungan sekitar dan bagian dari sosial masyarakat ditempat perusahaan beroperasi (Kurniawati, 2017). Menurut teori Legitimasi apabila operasi dan pengelolaan perusahaan mampu berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, kelompok masyarakat, individu, pemerintah dan perusahaan kongruen dengan harapan masyarakat dengan tujuan legitimasi dapat mendorong keberlangsungan hidup *(going concern)* perusahaan yang akan dapat mendatangkan manfaat dan sumber daya potensial bagi perusahaan (Farook, et.al. 2011).

Dalam mengadopsi pespektif berdasarkan teori legitimasi maka perusahaan harus melaporkan laporan tahunan perusahaan secara sukarela yang menggambarkan kesan tanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan penerimaan dari masyarakat, untuk praktik pengungkapan sosial perusahaan jika sudah sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat maka tanggung jawab sosial tersebut maka perusahaan dikatakan sudah dapat memenuhi harapan dari masyakarat dan lingkungan sekitar. Apabila perusahaan mempunyai usaha untuk selalu mempertahankan dan menetapkan bahwa perusahaan berjalan seusai dengan nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat serta dapat

mencegah legitimaci gap maka perusahaan akan terus dapat bertahan hidup karena dianggap sudah mampu menyesuaikan pandangan antara perusahaan dan masyarakat dalam menjalankan kegiatan bisnisnya (Widiyanti, 2017).

2.3 Teori *Stakeholder*

Pada tahun 1970-an mulai dikenal sebuah konsep mengenai pertanggungjawaban sosial yang lebih umum dikenal sebagai *stakeholder theory.* Lembaga *Standford Research Institute* 1963 adalah lembaga yang meperkenalkan istilah *stakeholder* oleh Freeman (1984). Freeman (1984) mengemukakan bahwa *stakeholder* dapat diartikan sebagai individu, grup maupun organisasi yang dapat mempengaruhi serta dipengaruhi oleh tujuan organisasi.

Sebuah perusahaan pada sudut pandang teori stakeholder merupakan bagian dari bernegara dan lingkungan bermasyarakat yang berperan aktif didalam sistem kehidupan sosial dilingkungan msyarakat serta memiliki hubungan timbal balik antara perusahaan dengan sosial masyarakat, karena perusahaan berdiri ditengah masyarakat sosial yang menjadikan perusahaan tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat berdiri berdasarkan kepentingannya sendiri tetapi juga harus memberikan manfaat bagi para stakeholdernya termasuk masyarakat, pemegang saham, konsumen, supllier, kreditor, analis, pemerintah serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Sehingga dapat disimpulkan jika eksistensi suatu perusahaan dilingkungan masyarakat merupakan andil dari pengaruh para stakeholder Khabibah (2013). Pelaksanaan CSR perusahaan adalah suatu strategi yang dilakukan untuk mendapatkan *feedback* dan dukungan positif dari para stakeholder, apabila pengungkapan *CSR* yang baik dilakukan perusahaan hal

tersebut menjadikan stakeholder semakin puas terhadap aktivitas serta kinerja yang dicapai perusahaan dalam mencapai keuntungan serta meningkatkan kinerja.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teori *stakeholders* menjelaskan jika aktivitas perusahaan tidak hanya semata-mata untuk kepentingan serta pencapaian laba maksimal perusahaan tersebut tetapi didalmnya juga menjelaskan mengenai pemenuhan kewajiban terahadap lingkungan serta pemangku kepentingan diantaranya masyarakat, karyawan, pemasok, pemerintah, investor, kreditor hingga masyarakat.

*2.*4 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan sebuah hubungan kontrak yang terjadi antara agen dan principal dan teori ini dapat menjelaskan pola dari hubungan antara pemilik perusahaan (*principle)* dengan manajer perusahaan (*agent)* karena memiliki hubungan kerjasama atas kontrak kesepakatan kedua pihak Jensen dan Meckling (1976). Teori ini mengungkapkan jika suatu perusahaan dengan ukuran besar harus mengungkapkan informasi lebih banyak untuk menghadapi konflik yang terjadi antara principal dan agen (Laludin, 2017). Dengan adanya kontrak hubungan kerjasama antara pihak *principle* dan *agent* maka pihak *principle* akan mendelegasikan kewenangannya kepada *agent*. Dengan adanya pendelegasian ini, pemilik perusahaan berharap agar pengelolaan yang dilakukan oleh manajer dapat memberikan pemilik tambahan keuntungan dan kesejahteraan. Namun demikian, pemisahan tersebut dapat berpotensi menimbulkan konflik antara pihak *principle* dan *agent* atau yang sering disebut dengan konflik keagenan *(Agency Conflict)*. Pada teori keagenan menggambarkan jika prinsipal dan agen memang memiliki perbedaan tujuan, pada konflik

keagenan terjadi karena pihak *principle* berusaha memperoleh keuntungan berupa keuntungan serta dividen yang maksimal dari hasil investasi mereka di pada perusahaan tersebut. Di sisi lain, *agent* untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya dengan cara memaksimalkan kompensasi yang diperolehnya, meskipun mungkin cara yang digunakan mencederai kepentingan pemilik perusahaan.

Ada 3 asumsi dasar sifat manusia yang terdapat dalam teori keagenan berdasarkan pendapat Eisenhardt (1989) diantaranya sebagai berikut:

1. Umumnya manusia memang egois dengan selalu mementingkan kepentingan pribadi serta tidak memperdulikan kepentingan orang lain.
2. Manusia adalah makhluk dengan daya piker yang terbatas akan hal-hal yang akan terjadi dimasa mendatang.
3. Sifat manusia sendiri yaitu sebisa mungkin akan menghindari setiap resiko yang mungkin terjadi.

Berdasarkan point-point tersebut dapat disimpulkan bahwa *agency conflict* bisa saja selalu terjadi pada suatu organisasi apalagi untuk organisasi atau perusahaan-perusahaan besar.

2.5 *Islamic Social Reporting* (ISR)

Perusahaan pada masa kini mendapat tekanan dari publik yang sangat tinggi dalam hal mengungkapkan Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini terjadi disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengungkapan sosial (CSR). Di Indonesia beberapa regulasi mengenai kewajiban pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah diatur serta telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tentang tanggung

jawab sosial yang dimuat dalam UUPT No. 40 tahun 2007.

Di Indonesia sendiri penerapan CSR sudah umum dan banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terutama perusahaan yang bergerak dibidang tambang dan manufaktur. Penerapan CSR memang tengah menjadi isu hangat dikalangan perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan tambang dan manufaktur tetapi saat ini praktik CSR juga telah diterapkan oleh perbankan baik konvensional maupun syariah yang diungkapkan pada laporan tahunan perusahaan yang masih relatif sederhana dan bersifat sukarela. Menurut Hannifa (2012) pada pelaporan tanggungjawab sosial perbankan konvensional masih memiliki berbagai keterbatasan, sehingga ia mengusulkan sebuah konsep mengenai pelaporan tanggungjawab social yang mengarah kepada pemenuhan terlaksananya CSR berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang cukup pesat, maka pemerintah mengeluarkan regulasi mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) khususnya untuk perbankan syariah. Regulasi mengenai perbankan syariah tercantum pada UU tahun 2008 Nomor 21 bab II dan terdapat pada pasal 4 ayat (1), (2), dan (3). Pasal 4 ayat (1) menyatakan jika bank syariah dan Unit Usaha Syariah harus menjalankan fungsi utama dari unit tersebut, fungsi yang dimaksud ialah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Pada ayah (2) memberikan penjelasan jika bank syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dapat berupa lembaga baitul mal yang berfungsi untuk menerima dana yang berasal dari zakat, hibah, sedekah, infak maupun dana sosial lainnya serta selanjutnya jika bank syariah dan Unit Usaha Syariah tersebut dapat menyalurkan dana tersebut kepada organisasi-organisasi pengelola zakat. Pada ayat ke (3) mengemukakan bahwa bank syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana social

berupa wakaf yang kemudian jika bank syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menyalurkan kepada nazir (pengelola wakaf) berdasarkan keinginan dari pemberi wakaf.

Pengungkapan sosial berdasarkan prinsip Islam (*Islamic Social Reporting*) adalah suatu standar dalam hal pelaporan kinerja social bagi perusahaan berbasis syariah. Islamic Social Reporting muncul serta berkembang berdasarkan suatu standar pelaporan AAOIFI yang selanjutnya sikembangkan kembali oleh para peneliti seperti Haniffa (2002) dan Othman, et.al (2009). Indeks *Islamic Social Reporting* adalah pengembangan dari standar pelaporan kinerja social yang didalamnya berisi tentang harapan harapan masyarakat yang bukan sekedar berperan dalam hal perekonomian saja, tetapi ikut berperan pada perspektif spiritual. Indeks ISR juga memberikan penekanan pada keadilan social terhadap masyarakat, karyawasn serta lingkungan.

Islamic Social Reporting adalah suatu kerangka khusus dengan tujuan untuk pemenuhan akuntabilitas kepada sang pencipta (Allah SWT) dan kepada masyarakat. Akuntabilitas menurut perspektif Islam yaitu suatu bentuk pertanggung jawaban sosial perusahaan yang dikeluarkan dan diungkapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tidak hanya berfokus pada aspek material serta moral saja tetapi juga berfokus pada aspek spiritual. Kerangka konseptual *Islamic Social Responsibility* berdasarkan prinsip syariah dapat diukur menggunakan indeks, indeks tersebut sering disebut dengan indeks *Islamic Social Responsibility* (ISR). Penelitian ini menggunakan indeks ISR mengacu kepada peneliti sebelumnya yaitu Haniffa (2002) dan mengacu pada penelitian Othman, et.al (2009).

Gambar 2.1 Kerangka Syariah

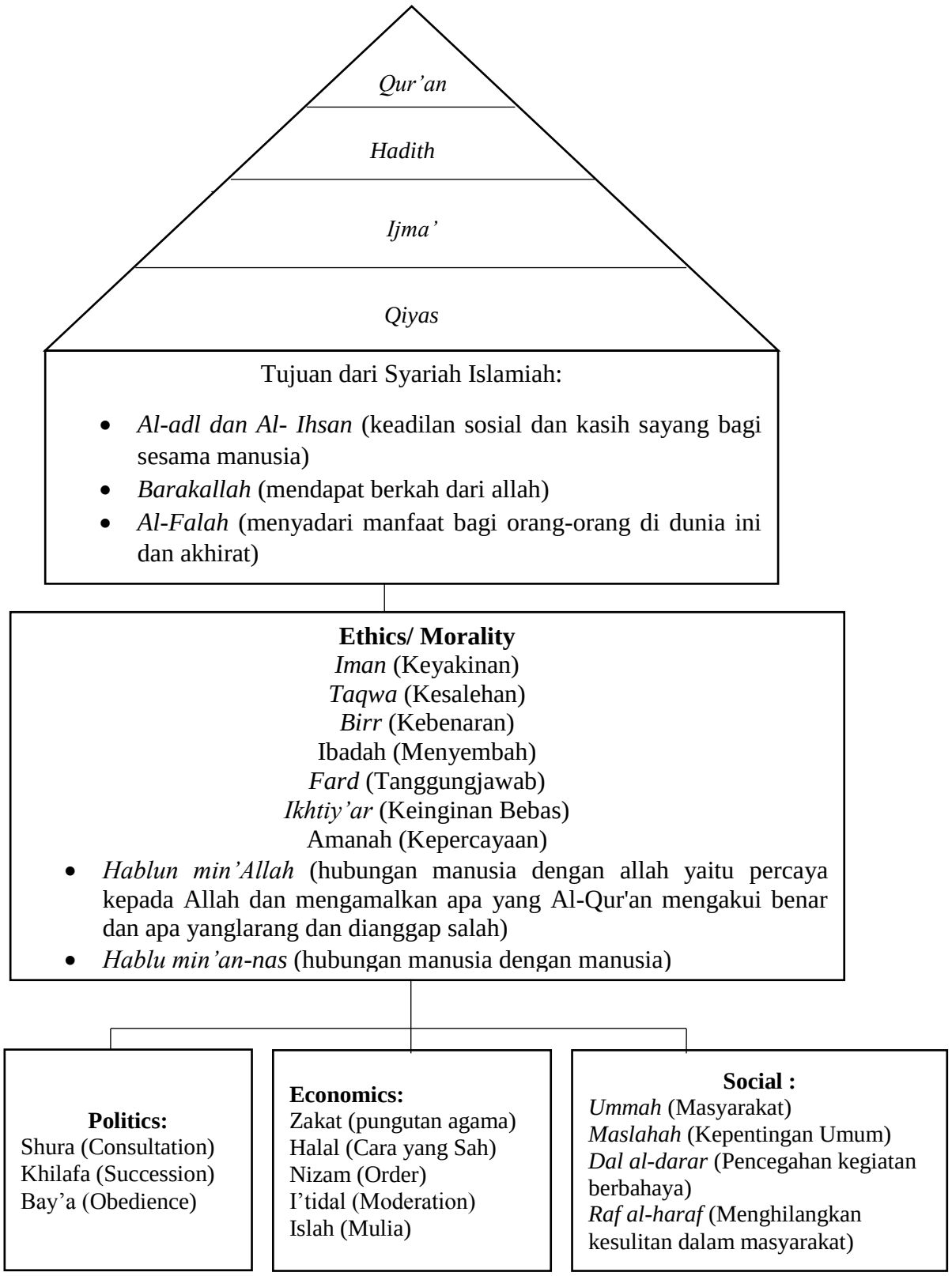

(Sumber : Haniffa, 2002)

Pada gambar diatas dapat disimpulkan bahwa pada prinsip-prinsip syariah berisi tentang petunjuk dan erat dengan kehidupan sehari-hari manusia yang tidak sekedar berisi tentang konsep etika pada perspektif Islam, contoh kegiatan yang erat denga kehidupan sehari-hari adalah ekonomi, social dan juga politik. ISR sendiri terletak pada ruang lingkup aspek ekonomi yaitu berada pada aspek akuntansi, sehingga disimpulkan ISR merupakan suatu kerangka pelaporan dari pertanggungjawaban sosial sesuai prinsip syariah.

Tujuan dari *Islamic Social Reporting* Haniffa (2002) ada dua yaitu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, selanjutnya yang lebih penting adalah akuntabilitas terhadap Allah SWT, cara yang harus ditempuh yaitu dengan memberikan informasi transparan, sesuai kebutuhan pembuat keputusan muslim serta relevan. Othman, et.al. (2010) mengemukakan ISR Indeks ada 6 indikator diantaranya (1) tema mengenai Investasi dan Keuangan, (2) tema mengenai Produk dan Jasa, (3) tema tentang karwayan, (4) tema tentang masyarakat, (5) tema tentang lingkungan hidup serta tema terakhir yaitu (6) Tata Kelola Organisasi

2.6 Karakteristik Perusahaan

Karakteristik perusahaan dapat diartikan sebagai suatu sifat dan ciri-ciri khusus yang terdapat pada perusahaan atau entitas. Penelitian ini menggunakan dua faktor pada variabel karakteristik yaitu umur perusahaan dan ukuran perusahaan.

a. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan oleh peneliti terdahulu digambarkan dengan jumlah kekayaan perusahaan, untuk melihat total aset atau kekayaan perusahaan terdapat

pada laporan keuangan perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan menjadi bagian penting dalam menentukan pelaporan pengungkapan sosial. Perusahaan dengan ukuran besar biasanya akan meperluas pengungkapan informasi tanggungjawab sosial dibandingkan perusahaan yang kecil hal tersebut dampak dari resiko besar yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan besar diantaranya resiko politis serta tekanan politis yang mendorong perusahaan untuk mengungkapkan kepedulian terhadap lingkungan perusahaan yang tercantum pada annual report perusahaan. Selain itu biasanya perusahaan dengan besar akan lebih mengungkapkan pelapoporan sukarela karena mereka memiliki produk yang beranekaragam dan tempat beroperasi yang tidak hanya pada 1 wilayah. Penelitian (Nugrahenil, 2017; Othman,*et.al*, 2009**;** dan Ayu, 2013) yang menemukan jika penelitian keduanya selaras bahwa ukuran dari suatu perusahaan memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan ISR.

b. Umur Perusahaan

Umur atau usia perusahaan menggambarkan tentang waktu yang telah dilalui perusahaan dimulai saat perusahaan berdiri hingga melangsungkan aktivitas bisnisnya supaya tetap eksis dan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Dan sejauh mana perusahaan dapat survive dapat dilihat melalui umur perusahaan (Widiyanti, 2017). Umur perusahaan dapat digunakan untuk menghadapi persaingan di dalam dunia bisnis. Dalam rangka memberikan *feedback* kepada para stakeholdersnya, perusahaan akan berusaha menerbitkan laporan pertanggungjawaban sosialnya secara berkelanjutan setiap tahunnya. Harapannya sebuah perusahaan yang semakin lama berdiri akan mengetahui apa

yang diinginkan oleh stakeholdersnya dan selalu berupaya meningkatkan kualitas laporan sosial di dalam laporan tahunan perusahaan. Pada penelitian Widiyanti (2017) menemukan bahwa variabel umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Perusahaan dengan usia yang semakin lama maka akan lebih mengetahui tentang informasi-informasi yang akan diungkapkan sehingga mendapat tanggapan baik atau *feedback* positif dari para stakeholder.

2.7 Good Corporate Governance (GCG)

Tata kelola yang baik (GCG) adalah bentuk pengelolaan perusahaan yang mencakup perlindungan pada seluruh kepentingan para investor atau pemengang saham serta kreditur dan GCG sebagai perangkat peraturan yang dapat digunkan untuk mengatur mengenai hubungan para pemegang saham, pemerintah, pihak kreditur, karyawan, pengelola perusahaan, dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Adapun tujuan dari GCG yaitu untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan (Forum for *Corporate Governance* in Indonesia, 2002). Penelitian ini menggunakan 12 indikator GCG diantaranya yaitu proporsi komisaris independen komite audit, Ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial , kepemilikan institusional, dewan pengawas syariah, komposisi direksi wanita, ukuran dewan direksi, frekuensi rapat komisaris, jumlah rapat komite audit, proporsi IAH, kepemilikan saham publik.

a. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan elemen penting yang terdapat pada GCG Chariri (2012). Peran dari Dewan komisaris yaitu mengawasi pelaksaan bisnis

perusahaan berjalan dengan baik memberikan nasihat kepada para direksi agar bisnis perusahaan berjalan dengan sebaik-baiknya dan dewan komisaris juga merupakan mekanisme penting dalam pengendalian internal yang memiliki tugas untuk memonitor dari tindakan para direksi dan manajemen atas dan memastika bahwa perusahaan telah menerapkan Good corporate governance didalam pengelolaan perusahaan (KNKG, 2006). Pengukuran variabel Ukuran Dewan Komisaris pada penelitian ini yaitu dengan melihat jumlah anggota dewan komisaris perusahaan pada laporan tata kelola perusahaan atau laporan tahunan perusahaan (Kurniawati, 2017).

b. Komite Audit

Komite Audit Independen merupakan elemen yang sangan diperlukan untuk menerapkan GCG pada perusahaan Chariri (2012). Peran dari komite audit yaitu melaksanakan pengawasan terhadap audit laporan keuangan, serta memonitoring bahwa dalam penyusunan serta pelaporan laporan keuangan perusahaan sudah sesuai dengan standar dan kebijakan yang berlaku, serta melakukan pemeriksaan ulang tentang kesesuaian dan konsisten antara laporan keuangan perusahaan apakah sudah sesuai dengan standar serta menilai kewajaean biaya dari auditor eksternal dan menilai mutu pelayanan (KNKCG, 2002).

c. Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan anggota dari dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan pihak manajeman dan para pemegang saham pengendali. Komisaris independen adalah bagian dari perusahaan yang berdiri sendiri secara independen dan bebas dari hubungan bisnis yang dapat memberikan

pengaruh untuk bertindak secara independen yang mana hal tersebut berguna untuk kepentingan perusahaan. (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Keberadaan dari komisaris independen profesional adalah salah sati syarat perusahaan untuk dapat listed di bursa efek dan harus memiliki 30% minimal komisaris independen dari seluruh anggota dewan komisaris perusahaan.

d. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan saham institusi yang terdapat pada perusahaan, dengan adanya kepemilikan saham oleh suatu institusi tentu akan memberikan dorongan agar perusahaan baik lagi dalam mengelola bisnis yang sedang berjalan karna dalam hal ini institusi yang menanamkan sahamnya pada perusahaan akan terus melakukan pengawasan terhadap tatakelola perusahaan, investor institusi akan berperan sebagai kontrol untuk menghindari prilaku yang berlawanan dengan etika bisnis. Penelitian ini mengukur kepemilikan institusional dengan melihat presentase saham yang dimiliki oleh institusi terhadap total saham perusahaan yang beredar (Fachrurrozie, et.al. 2013)**.** Adanya kepemilikan oleh institusional tertentu merupakan bagian dari mekanisme GCG yang dapat mengurangi konflik-konflik oleh pihak-pihak yang berkepentingan, untuk menjaga kepercayaan para investor institusi para manajemen memiliki tugas untuk membuat informasi transparan yang bertujuan untuk menjaga para investor dari institusional tersebut (Herwijayanti, et. al. 2015).

e. Komposisi Direksi Wanita

Keragaman gender diukur dengan menjumlah keberadaan direksi wanita yang terdapat pada jajaran dewan direksi perusahaan. Dengan adanya

keberagaman gender pada suatu perusahaan berarti perusahaan telah memberikan kesetaraan serta kesempatan yang sama bagi siapa saja yang memiliki potensi terbaik, komposisi dari direksi wanita dapat memberi keterangan jika tidak terjadi deskriminasi. Keragaman dewan telah berubah menjadi sebuah komponen penting dalam Corporate Governance (Carter,et.al dalam Majeed 2015) lebih lanjut mengekspos bukti eksperimental sebuah hubungan positif yang cukup besar antara keragaman papan dalam hal persentase perempuan di dewan direksi dan nilai-nilai perusahaan.

f. Ukuran Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan organ inti dari perusahaan yang memiliki wewenang serta memiliki tanggungjawab mengenai kepentingan perusahaan serta bertanggungjawab atas kepengurusan pengeloaan operasional yang sedang berjalan (Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang PT Pasal 1). Prinsip yang harus dipenuhi agar terciptanya pelaksaan tugas direksi yang efektik yaitu komposisi dari dewan direksi harus dibuat dan disusun sebaik mungkin dengan tujuan untuk pengambilan keputusan yang efektif, cepat, independen serta (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Dewan direksi memiliki peran penting terkait praktik Corporate Governance pada suatu perusahaan. Ukuran dewan direksi dapat menginformasikan tentang tingkat pengungkapan dan transparansi dalam perusahaan. Dalam memeriksa hubungan antara ukuran dewan dan pengungkapan pelaporan CSR (Majeed, et.al, 2015).

g. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah merupakan bagian yang harus dimiliki oleh perbankan syariah, karena DPS dalam hal ini berperan sebagai badan yang memberikan pengarahan, konsultasi, evaluasi serta pengawasan dari kegiatan operasional perbankan syariah serta memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan bank tersebut telah menaati prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governan*ce tahun 2004, syarat-syarat yang harus dimiliki oleh dewan pengawas syariah yaitu:

a. Ketua dan aggota dewan pengawas syariah serta anggota harus memiliki keahlian di bidang fiqih muamalat, syarat selanjutnya selain keahlian fiqih muamalat ketua dan anggota DPS juga harus memiliki pemahaman dan pengalaman pada bidang lembaga keuangan syariah.
b. Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, kegiatan pengarahan, konsultasi, serta evaluasi, pada kegiatan bank syariah harus dilaksana paling sedikit satu kali sebulan, dan kegiatan tersebut mencakup transaksi sumber dana, penyaluran dana, alokasi untuk bagi hasil dengan nasabah pemilik dana serta mengenai alokasi sumber dana dari pendapatan non halal yang sesuai dengan ketentuan dari prinsip-prinsip syariah.
c. Pemberian kebebasan kepada dewan pengawas syariah untuk dapat mengakses dokumen-dokumen serta informasi mengenai kegiatan bank.
d. Pada laporan keuangan tahunan perbankan syariah harus mencantumkan laporan pendapat dari dewan pengawas syariah yang berisi tentang kepatuhan atau pelanggaran yang dilakukan bank dalam menjalankan usahanya.

e. Pada laporan keuangan laporan pendapat dewan pengawas syariah harus tercantum tanda tangan dari semua anggota dewan pengawas syariah dan harus diterbitkan bersamaan dengan publikasi laporan *annual report* bank tersebut.

Dewan pengawas syariah adalah perbedaan yang paling penting antara Islam dan Bank konvensional (Farook et.al, 2011). Studi sebelumnya telah menemukan bahwa keberadaan dewan pengawas syariah dan karakteristiknya telah meningkatkan kualitas pemantauan dan telah meningkatkan tingkat pengungkapan CSR di antara bank-bank Islam (Farook et.al, 2011). Bank syariah yang memiliki DPS yang memenuhi kriteria dari IG-Score cenderung lebih luas untuk mengungkapankan tanggungjawan sosial atau islamic social reporting bank. Untuk kasus bank syariah, anggota dewan pengawas syariah dengan pengetahuan keuangan dan pengalaman dapat melaksanakan tanggung jawab mereka lebih efektif daripada anggota tanpa pengetahuan tersebut. Selain itu, bank-bank Islam dengan anggota mahir finansial di dewan pengawas syariah mereka akan lebih transparan dan etis dalam mengungkapkan kegiatan mereka dengan kelompok pemangku kepentingan yang berbeda dan masyarakat pada umumnya, dan akan mencoba untuk mengurangi efek negatif dari kegiatan sosial, lingkungan dan ekonomi mereka pada kesejahteraan masyarakat (Rahman, 2013).

h. Frekuensi Rapat Komisaris

Dewan komisaris merupakan salah satu mekanisme inti didalam good corporate governance (GCG), yang memiliki peran memberikan pengawasan terhadap pengelolaan bisnis perusahaan, berupa pengawasan terhadap kinerja para

dewan direksi untuk memastikan bahwa hasil kinerja dari para manajemen puncak berjalan sesuai garapan para investor. Dewan komisaris juga bertugas sebagai penjamin pelaksaaan dari strategi yang direncanakan perusahaan serta memonitoring dalam pelaksanaan strategi tersebut, dan mewajibkan perusahaan untuk memenuhi pelaksaan akuntabilitas. Frekuensi dari rapat komisaris yaitu jumlah rapat para dewan komisaris yang dilakukan pada satu tahun. Rapat rutin para komisaris dilakutan untuk mengevaluasi kierja serta kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh para direksi. Frekuensi Rapat para dewan Komisaris pada penelitian ini diproksi dengan total rapat komisaris setahun Chariri (2012) implementasinya semakin intens rapat yang dilakukan oleh para dewan komisaris dapat meningkatkan kinerja serta meningkatkan pengungkapan mengenai tanggungjawab sosial perusahaan.

i. Jumlah Rapat Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris, yang memiliki fungsi memperkuat dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan audit, proses pelaporan keuangan, manajemen resioko serta pengimplementasian GCG pada perusahaan, maka dalam hal ini komite harus bekerja independen serta profesional dibidangnya menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI). Jumlah rapat komite audit merupakan total rapat anggota dari komite audit yang dilaksanakan dalam satu tahun, sehingga harapanya apanila rapat yang dilakukan oleh para komite audit semakin sering maka akan dapat meningkatkan kinerja serta akan memudahkan koordinasi pada

komite audit sehingga dalam melaksanakan tuganya akan berjalan efektif (Chariri,2012). Sehingga dapat diambil kesimpulan jika rapat yang diadakan oleh komite audt semakin intens maka mendorong perusahaan untuk mengungkapkan yang transparan mengenai informasi laba dan *corporate social reporting* (CSR) pada perusahaan tersebut.

j. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki oleh para manajer, dengan adanya kepemilikan sebagian saham perusahaan oleh manajer maka akan membuat para manajer bekerja dengan sebaik-baiknya dan dapat meningkatkan kinerja manajer pada perusahaan, karena ada investasi yang mereka tanamkan juga pada perusahaan tersebut dan sebaliknya jika ada kerugian maka manajer juga akan ikut menanggung kerugian tersebut. Selain menerima manfaat langsung para manajer juga akan menerima konsekuensi sebagai pemilik saham apabila terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan perusahaan adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Kepemilikan manajerial pada penelitian ini diproxy dengan persentase saham milik manajemen (Badjuri, 2012).

k. Proporsi IAH

Investment Account Holders (IAH) yaitu struktur dari kepemilikan dana perbankan syariah yang merupakan dana dari nasabah, *Investment Account Holders* (IAH) pada penelitian ini di*proxy*kan oleh dana syirkah temporer. Faktanya bahwa keuntungan yang didapat oleh para pemegang saham pada

perbankan syariah ditentukan dari perolehan keuntungan oleh pemanfaatan dana syirkah tersebut (Farook et.al, 2011). Proporsi IAH diduga memiliki pengaruh yang positif pada tingkat pengungkapan ISR karena jika rasio IAH tinggi maka perusahaan akan mengungkapkan ISR lebih luas sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada *stakeholders*nya atau dalam hal ini adalah nasabah.

l. Kepemilikan Saham Publik

Saham yang dimiliki masyarakat atau sering disebut saham publik adalah jumlah kepemilikan saham publik yang terdapat pada perusahaan. Apabila kepemilikan dari masyarakat semakin besar maka perusahaan juga akan semakin meningkatkan pengungkapan sosialnya karena saham masyarakat terdapat dalam saham perusahaan, maka setiap kegiatan tentu harus diketahui oleh publik. Di Indonesia Kepemilikan saham masyarakat umum pada perusahaan yang boleh dimiliki yaitu sebesar 5% (Jannah dan Asrori, 2016**)**. Perusahaan yang telah listing di bursa efek didorong untuk mengungkapkan informasi agar lebih transparan yang tujuannya agar tercipta pasar modal yang lebih efisien. Apabila kepemilikan dari saham publik besar maka akan meningkatkan pengawasan dari masyarakat juga lebih intens, penyebabnya karena investor luar atau masyarakat menginginkan investasi mereka tetap terlindungi, untuk mengetahui bahwa investasi mereka terlindungi yaitu dengan mendapatkan informasi baik aspek keuangan atau non keuangan yang diungkapkan perusahaan pada annual report dengan tujuan dapat memberikan informasi serta pengambilan keputusan, sehingga disimpulkan apabila tingkat kepemilikan saham oleh publik semakin tinggi maka akan meningkatkan pengungkapan laporan tahunan perusahaan.

2.8 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan alat ukur yang dapat dgunakan untuk mengetahui potensi serta perkembangan perusahaan baik dari masa lalu hingga masa datang selanjutnya kinerja keuangan dapat dilakukan analisis yang dapat memberikan gambaran mengenai pengelolaan perusahaan dan dapat memperlihatkan mengenai realita yang sedang terjadi pada perusahaan pada masa kini. Indikator yang digunakan pada penelitian yaitu yaitu profitabilias (ROA dan ROE), leverage (DER), likuiditas (FDR) dan solvabilitas (DAR).

a. Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan ekuitas. Indikator Profitabilitas pada penelitian ini yaitu dengan ROA dan ROE. Alasan dipilihnya ROA karena pada peneliti terdahulu banyak yang telah menyoroti rasio ROA, dan rasio ini dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan yang dicapai perusahaan dalam meningkatkan dan menghasilkan laba. *Return On Asset* yaitu rasion yang mampu memperoyeksi keuntungan dimasa lalu dan masa yang akan datang. Dengan tingkat profitabilitas yang tinggi harapannya diimbangi dengan pengungkapan sosial perusahaan yang lebih luas pula, profitabilitas tinggi diharapkan akan menarik para investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Selanjutnya apabila semakin tinggi profitabilitas maka akan dapat memberikan motivasi kepada pihak manajemen agar lebih luas menyajikan laporan tanggungjawab sosial dengan tujuan untuk memberikan keyakinan kepada investor sehingga harapannya investor akan meningkatkan kompensasi menejemen (Kurniawati, 2017).

b. *Leverage*

Leverage pada penelitian ini diproyeksi oleh DER (*Debt to Equity Rasio)* hal ini didasarkan pada peneliti terdahulu (Taufik, et.al, 2015; Sembiring, 2013 dan Mahendra, et.al, 2012). Rasio *leverage* dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan liabititasnya. Laverage yang semakin tinggi berdampak pada pelanggaran perjanjian kredit yang dilakukan perusahaan, karena perusahaan akan selalu berupaya untuk melaporkan keuntungan yang sebesar-besarnya, untuk meningkatkan angka keuntungan pada laporan keuangan maka manajer perusahaan akan berupaya untuk mengecilkan biaya perusahaan, dalam hal ini salah satu biaya yang akan dikecilan yaitu biaya untuk melakukanpengungkapan CSR. Sehingga semakin tingi tingkat *leverage* maka akan menyebabkan rendahnya perusahaan dalam pengungkapan *islamic social reporting* (Sembiring, 2013).

c. Likuiditas

Likuiditas merupakan keadaan yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya serta mampu membiayai operasi perusahaan. Penggunaan dari rasio ini dapat dijadikan gambaran mengenai pengaruh ketersediaan dana untuk perluasan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut teori sinyal apabila likuiditas perusahaan rendah maka perusahaan akan melakukan pengungkapan sosial yang lebih luas. Manajeman adalah pihak yang lebih mengetahui mengenai kinerja dari suatu perusahaan dibandingkan investor, hal ini karena investor hanya sebagai pengguna dari hasil akhir proses penyusunan laporan keuangan yang didalamnya termasuk rasio-rasio keuangan. Efek dari likuditas yang rendah akan meberikan nilai negatif dari investor, hal tersebut yang menjadi pemicu perusahaan untuk

mengurangi asimetri informasi yang dilakukan dengan cara pengungkapan tanggungjawab sosial. Suatu perusahaan dikatakan sehat secara finansial akan memungkin melakukan mengungkapkan informasi yang luas dari CSR likuiditas yang lebih rendah. Pada penelitian ini leverage diproyeksi dengan total pembiayaan terhadap Pihak terkait ketiga berdasarkan peneliti terdahulu (Putra, et.al, 2014).

d. Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban secara finansial perusahaan saat perusahaan tersebut dilikuidasi. Pada peneltian ini berdasarkan peneliti terdahulu Putra, et.al. (2014) diproyeksi dengan Debt to Asset Rasio (DAR) rasio ini mengukur seberapa banyak aset dari perusahaan yang berasal dari hutang dan seberapa besar hutang tersebut memiliki pengaruh pada pengelolaan asset . apabila dalam mengelolah kekayaan atau aset perusahaan dapat mencukupi untuk membayar hutangnya untuk jangka yang pendek dan panjang jika perusahaan likuidasi maka perusahaan tersebut dikatakan solvabel. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan tingkat solvabilitas yang baik dapat digambarkan dengan pemenuhan kewajiban perusahaan jangka pendek dan panjang apabila dilikuidasi. (Lekok dan Johan, 2006 dalam Herusetya, 2012).

2.9 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan beberapa temuan penelitian sebelumnya penulis membuat model kerangka pikir dengan tujuan adalah untuk mempermudah dalam memahami pengaruh karakteristik perusahaan, GCG dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan ISR*:*

Gambar 2.2

Kerangka Fikir

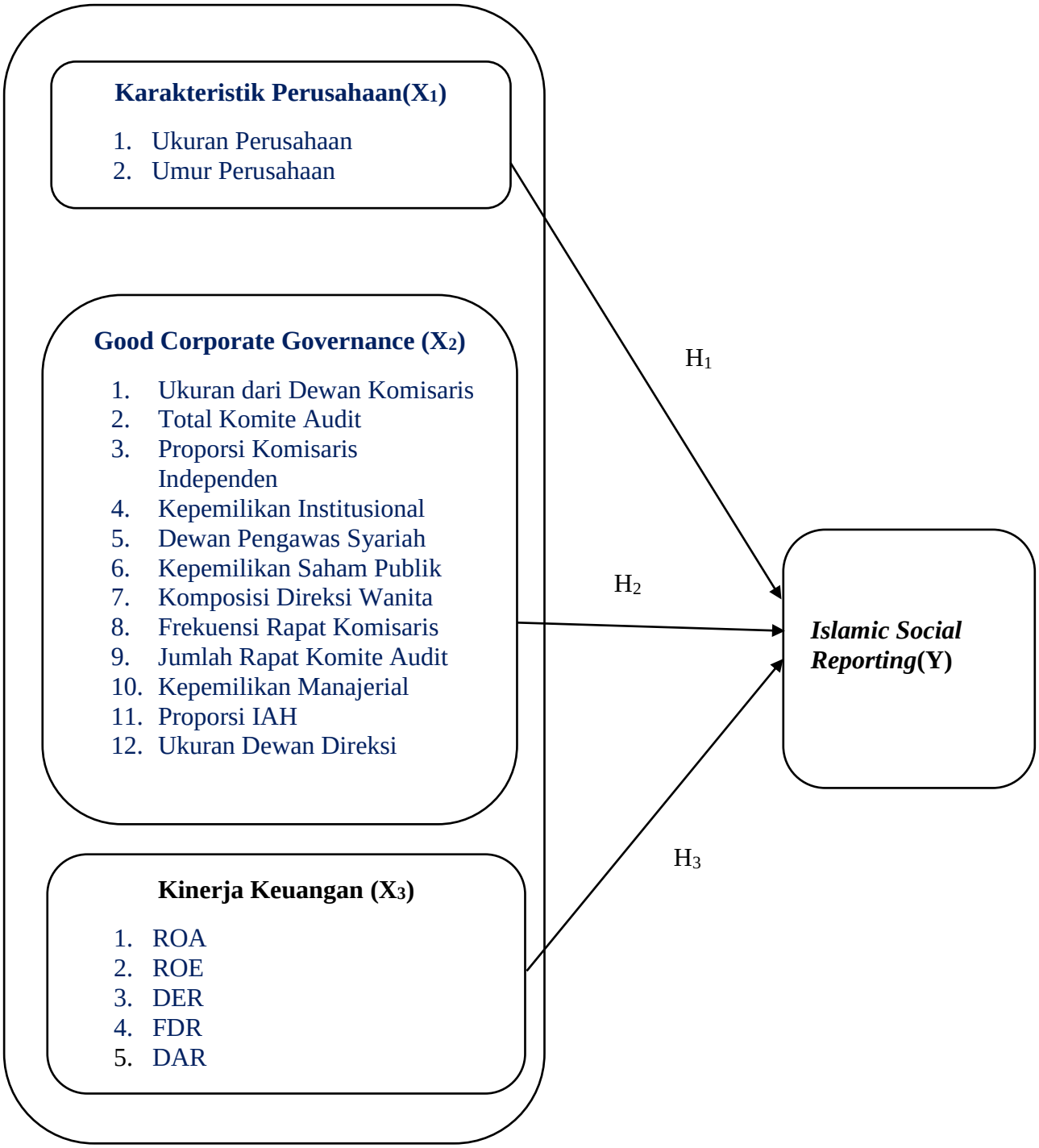

Gambar 2.2 Kerangka Penelitian

Tabel 2.2
Peneliti terdahulu tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan ISR

No	Indikator Variabel	Otman, et.al (2009)	Putra, et.al (2014)	Asrori (2016)	Farook , et.al (2011)	Rouf (2011)	Majeed , et.al (2015)	Sembiring (2013)	Badjuri (2011)	Chariri (2012)
	Karakteristik Perusahaan									
1	Ukuran Perusahaan	√	√	√		√	√		√	
2	Umur Perusahaan						√			
	Good Corporate Governance									
1	Ukuran Dewan Komisaris	√		√					√	√
2	Komite Audit			√		√			√	√
3	Proporsi Komisaris Independen								√	√
4	Kepemilikan Institusional						√		√	
5	Kepemilikan Saham Publik			√				√	√	
6	Dewan Pengawas Syariah				√					√
7	Komposisi Direksi Wanita						√			
8	Frekuensi Rapat Komisaris									√
9	Jumlah Rapat Komite Audit									√
10	Kepemilikan Manajerial								√	
11	Proporsi IAH				√					
12	Ukuran Dewan Direksi						√			
	Kinerja Keuangan									
20	ROA	√	√							
21	ROE					√	√			
22	DER						√	√		
23	FDR		√							
24	DAR		√							

Tabel 2.2 Merupakan dasar dari pembetukan kerangka fikir penelitian.

2.10 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis pada penelitian merupakan suatu dugaan yang bersifat sementara, dan peneliti harus harus dibuktikan akan kebenarannya atas dugaan tersebut. Berdasarkan model pada penelitian ini serta kerangka fikir dalam peneltian maka pengembangan hipotesis sebagai berikut:

a. Hubungan karaketistik perusahaan dengan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Atas dasar teori legitimasi keberadaan suatu perusahaan besar menggunakan akan sumber daya yang sangat besar pula maka perlunya untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial lebih luas. Proxy variabel karakteristik perusahaan pada penelitian ini yaitu pertama Ukuran perusahaan yang merupakan faktor penting untuk menentukan pelaporan pengungkapan sosial. Besarnya suatu perusahaan biasanya perusahaan tersebut dalam mengungkapkan suatu informasi lebih luas juga dibandingkan dengan perusahaan kecil, hal tersebut karena resiko yang dihadapi oleh perusahaan lebih besar lebih tinggi salah satunya resiko politis yang secara umum bahwa jika perusahaan besar tidak dapat terlepas dari resiko tekanan politis yang mendorong perusahaan melakukan pertanggungjawaban sosialnya dengan cara mengungkapkan kepedulian tersebut kepada lingkungan sekitar yang dapat dilihat pada pelaporan keuangan perusahaan. Penelitian Othman, et.al (2009**)** dan Ayu (2013) mengemukakan jika ukuran suatu perusahaan secara positif memiliki pengaruh pada pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Yang kedua yaitu umur perusahan yang menggambarkan eksistensi perusahaan yang mampu bersaing didunia bisnis, jika perusahaan berdiri semakin lama maka

harapannya perusahaan dapat selalu berupaya meningkatkan kualitas laporan sosial di dalam laporan tahunan perusahaan. Pada penelitian Widiyanti (2017) menemukan bahwa variabel umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan hipotesis:

H_1: Karakteristik perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

b. Hubungan GCG (*Good Corporate Governance*) dengan pengungkapan *Islamic Social Reporting*(ISR)

Berdasarkan teori stakeholders, pengungkapan sosial perusahaan dianggap dapat berperan sebagai alat dan media komunikasi antara perusahaan dengan para stakeholder, sehingga semakin besar adaptasi perusahaan dengan para stakeholder maka akan semakin *powerfull* stakeholdersnya. *Good Corporate Governance* (GCG) dan pengungkapan sosial memiliki kedudukan yang kuat dalam dunia bisnis dan saling berhubungan satu sama lain. *CSR* berorientasi kepada para *stakeholders* hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip utama *good corporate governance* yaitu *responsibility*, sedangkan pengungkapan pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam hal ini ISR perusahaan sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. *Corporate Governance* sangat efektif untuk memastikan bahwa kepentingan *stakeholders* telah dilindungi. *Corporate governance* diharapkan dapat berfungsi sebagai alat pemberi keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima keuntungan atas dana yang mereka investasikan pada perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus

melakukan pengungkapan terhadap aspek-aspek kinerja ekonomi, sosial, lingkungan, dan keberlanjutan perusahaan sebagai wujud akuntabilitas terhadap para investor dan *stakeholders*. Sehingga penerapan konsep *Good Corporate Governance* diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Variabel *good corporate governance* (GCG) pada penelitian ini di proxy dengan Ukuran dewan komisaris, komite audit, proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan saham publik, dewan pengawas syariah, komposisi direksi wanita, ukuran dewan direksi, frekuensi rapat komisaris, jumlah rapat komite audit, kepemilikan manajerial, dan proporsi IAH. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan hipotesis:

H_2: *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

c. Hubungan Kinerja Keuangan dengan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu dengan *agent* dalah hal ini adalah direksi dan manajeman yang menerima pendelegasian tersebut. Berdasarkan teori keagenan pihak manajemen sebagai pihak yang secara langsung terlibat di dalam mengelola perusahaan pasti memiliki informasi yang lebih memadai di bandingkan dengan investor. Investor cenderung menerima informasi hanya dari pihak manajemen melalui laporan keuangan tanpa mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya, agar saham perusahaan tetap eksis dan tetap diminati oleh investor. dan terus menjaga kepercayaan investor maka perusahaan perusahaan perlu terus menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan. Kinerja keuangan

perusahaan merupakan salah satu faktor yang dilihat oleh calon investor untuk menentukan investasi saham. Dengan kinerja yang baik maka pengungkapan tanggung jawab sosial semakin luas dan transparan. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah satu komitemen manajemen untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam kinerja sosial. Beberapa penelitian yang menghubungkan antara kinerja keuangan dengan pengungkapan sosial sudah banyak dilakukan. Diantaranya penelitian Kurniawati (2017) yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan variabel profitabilitas. Sembiring (2013) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan ROA tidak berpengaruhterhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian yang lain menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR yaitu penelitian Mahendra, et.al. (2012) dengan variabel likuiditas, profitabilitas positif berpengaruh positif., Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan hipotesis:

H_3: Kinerja Keuangan positif berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.